

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya ekonomi menandakan berjalannya kegiatan sektor ekonomi yang dimulai dari hulu hingga hilir. Perekonomian senantiasa bergerak seiring dengan adanya aktivitas individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhannya. Kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan yang ditandai dengan melemahnya indikator pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), level pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2010 yaitu 6,10%, tetapi turun ke level 5,02% pada tahun 2019 serta turun menjadi minus 2,07% di tahun 2020. Penurunan level yang terjadi disebabkan oleh beragam aspek ekonomi. Konsumsi rumah tangga adalah salah sebuah elemen ekonomi yang memegang peranan penting dalam perekonomian. Dalam komposisi perekonomian Indonesia, konsumsi rumah tangga mendominasi separuh lebih PDB dari sisi permintaan, serta menjadi sumber terbesar indikator pertumbuhan ekonomi. Dengan besarnya peran tersebut, maka menganalisis dinamika konsumsi rumah tangga sangat penting untuk dapat memahami fluktuasi makroekonomi.

Konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran konsumsi yang meliputi seluruh pengeluaran konsumsi masyarakat baik barang maupun jasa guna memenuhi secara langsung kebutuhan seorang ataupun kelompok (Badan Pusat Statistik, 2021). Beragam faktor dapat mempengaruhi dinamika konsumsi rumah tangga. Keynes dalam teori konsumsinya yaitu *Absolute Income Hypothesis (AIH)*, menerangkan bahwa pendapatan saat ini adalah determinan utama pengeluaran konsumsi saat ini. Pendapatan yang semakin tinggi menyebabkan uang yang akan digunakan rumah tangga untuk pengeluaran konsumsi semakin tinggi pula (Keho, 2019). Pengeluaran yang dilakukan pemerintah juga merupakan faktor pendorong konsumsi rumah tangga. Keynesian berpendapat bahwa perubahan yang diberikan oleh pengeluaran pemerintah akan menghasilkan efek pengganda pada pengeluaran masyarakat (Sugiarto & Wibowo, 2020). Inflasi merupakan faktor yang dapat menekan konsumsi rumah tangga. Semakin tinggi inflasi, menunjukkan semakin

tinggi pula harga yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang, sehingga masyarakat cenderung menahan konsumsi. Faktor demografi yaitu jumlah penduduk juga ikut berpengaruh pada tinggi rendahnya konsumsi rumah tangga. Jumlah Penduduk merepresentasikan jumlah konsumen, sehingga semakin banyak penduduk berdampak pada semakin tingginya konsumsi masyarakat. Peneliti memilih faktor-faktor tersebut untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi rumah tangga tingkat provinsi di Pulau Jawa.

Sebagian besar PDB Indonesia disumbangkan oleh aktivitas ekonomi khususnya dari sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa. Pulau ini merupakan pulau yang menjadi pusat kegiatan perekonomian nasional. Rata-rata kontribusi konsumsi rumah tangga Pulau Jawa terhadap konsumsi nasional selama periode 2012-2021 yaitu sebesar 65,18%. Capaian ini menjadikan Pulau Jawa sebagai pulau dengan kontribusi konsumsi rumah tangga terbesar, akan tetapi tingkat pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa cenderung fluktuatif. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada Pulau Jawa rata-rata hanya sebesar 4,11%, yang mana nilai ini masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pulau besar lainnya. Untuk dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, maka sektor konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa harus ditingkatkan. Dengan adanya fenomena ini peneliti memilih seluruh provinsi yang berada di Pulau Jawa sebagai objek penelitian.

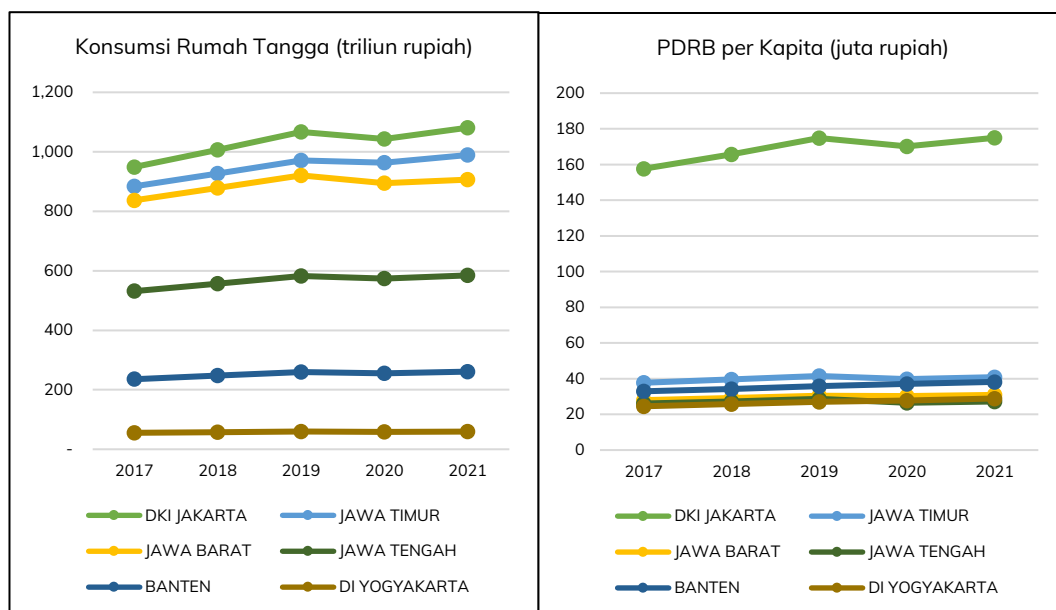
**Tabel 1. Rata-rata Kontribusi Konsumsi dan Rata-rata Pertumbuhan Konsumsi Tahun 2012-2021 (persentase)**

<b>Nama Pulau</b>	<b>Rata-rata Kontribusi Terhadap Konsumsi Nasional</b>	<b>Rata-rata Pertumbuhan Konsumsi</b>
Pulau Sumatera	19,46	4,01
Pulau Jawa	65,18	4,11
Pulau Bali & Nusa Tenggara	3,35	3,50
Pulau Kalimantan	4,40	3,57
Pulau Sulawesi	5,56	4,88
Pulau Papua & Maluku	1,95	4,27
Nasional	100	4,09

*Sumber: BPS data diolah, 2022*

Menurut pendapat Keynes, pengeluaran konsumsi rumah tangga banyak dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Jika pendapatan naik, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan naik, namun kenaikan tersebut masih lebih rendah dibanding kenaikan pendapatan. Dalam penelitian ini ukuran pendapatan di-*proxy* dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita. Adapun nilai yang digunakan pada penelitian ini adalah PDRB berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK). Nilai PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang diciptakan oleh semua kegiatan ekonomi bila didistribusikan secara merata kepada seluruh penduduk wilayah tersebut. (Bappeda Provinsi DIY & BPS Provinsi DIY, 2020).

**Grafik 1. PDRB per Kapita dan Konsumsi Rumah Tangga di Pulau Jawa Tahun 2017-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Grafik 1, tersaji nilai konsumsi rumah tangga dan PDRB per Kapita menurut provinsi. Perkembangan PDRB per Kapita di Pulau Jawa menunjukkan tren positif, kendati demikian laju pertumbuhannya cenderung lambat yakni kurang dari 3% tiap tahunnya. Diketahui bahwa Provinsi Banten memiliki PDRB per Kapita yang cukup besar, namun dari sisi konsumsi rumah tangganya tergolong cukup

rendah, hal ini menandakan adanya *gap* karena pendapatan yang tinggi tidak mampu menaikkan tingkat konsumsi rumah tangganya. Keadaan demikian mengindikasikan masih belum optimalnya fungsi pendapatan sebagai sarana berkonsumsi oleh rumah tangga. PDRB per Kapita di Banten tercatat sebesar 33,53 juta rupiah di tahun 2020, sedangkan konsumsi rumah tangganya sebesar 255,03 triliun rupiah. Besarnya PDRB per Kapita di Banten karena banyak ditopang oleh aktivitas ekonomi di kota Cilegon dan Tangerang yang biasa dijuluki sebagai kota industri (BPS Provinsi Banten, 2020). Disamping itu, perlambatan yang terjadi pada kelompok non makanan menyebabkan rendahnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Fluktuasi tertinggi terjadi pada konsumsi rumah tangga di golongan hotel serta restoran yang mengalami perlambatan hingga 3,25% pada tahun 2019, serta turun ke -4,50% di tahun 2020. Terkonfirmasi juga fluktuasi konsumsi pada golongan transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya (Badan Pusat Statistik, 2020). Fenomena yang menunjukkan kesenjangan dengan teori selanjutnya terjadi di Provinsi Jawa Barat, meskipun tercatat memiliki capaian PDRB per Kapita yang tergolong rendah, namun ditinjau dari konsumsi rumah tangganya ternyata cukup tinggi. Keadaan ini dikarenakan oleh distribusi pendapatan yang relatif kurang merata di beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat (Karim et al., 2019).

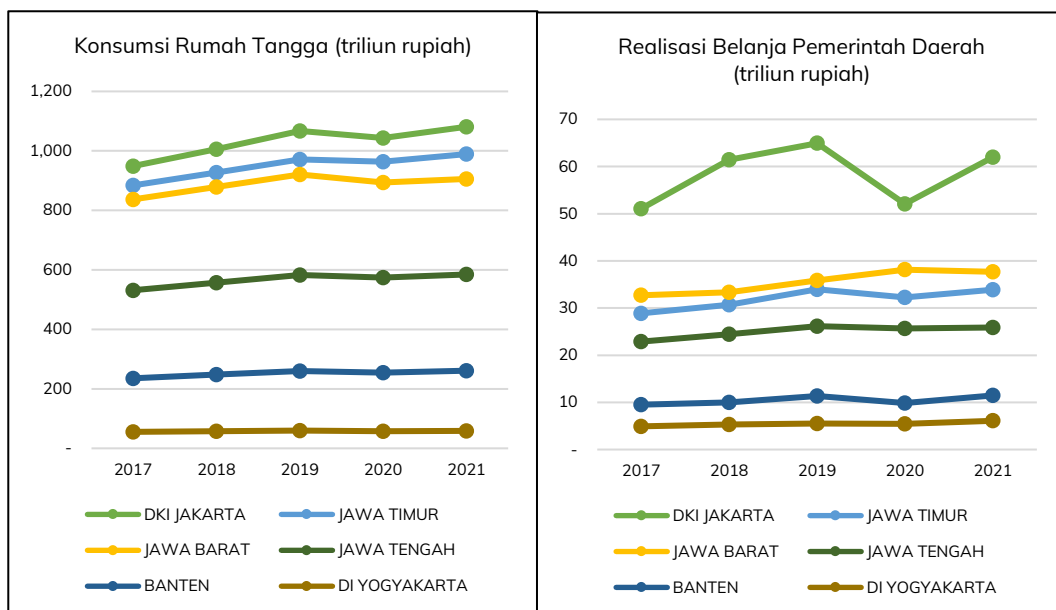
Kondisi yang baik dialami oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Dimana kedua provinsi tersebut tercatat memiliki nilai PDRB per Kapita terbesar diikuti oleh konsumsi rumah tangga yang juga besar. Keadaan ini sesuai dengan teori dimana tingginya PDRB per Kapita berpengaruh pada peningkatan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2020 besaran PDRB per Kapita di DKI Jakarta berada pada level 168,41 juta rupiah. Posisi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian membuat relatif tingginya kegiatan sektor ekonomi di provinsi ini, sehingga menjadikan kemampuan ekonomi daerah DKI Jakarta tergolong paling tinggi dibanding daerah di wilayah lain (Indrayansyah & Taufiqur Rakhman, 2019). Menurut Badan Pusat Statistik (2020), tingginya PDRB per Kapita di DKI Jakarta juga karena dominasi sektor industri pengolahan, sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Di Provinsi Jawa Timur nilai PDRB per Kapita di tahun 2020 adalah sejumlah 56,64 juta rupiah. Penyebab relatif besarnya PDRB per Kapita yaitu terjadi bersamaan dengan

semakin meningkatnya kapasitas ekonomi Provinsi Jawa Timur sebagai daerah penyangga kawasan Indonesia bagian timur (BPS Provinsi Jawa Timur, 2022).

Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mengalami kondisi yang relatif sama, yaitu keduanya tercatat memiliki PDRB per Kapita cukup rendah dibanding provinsi lain, serta diikuti oleh rendahnya konsumsi rumah tangga. Fenomena ini sesuai dengan teori, dimana dengan rendahnya pendapatan yang ditinjau dari nilai PDRB per Kapita dibarengi dengan rendahnya nilai konsumsi rumah tangga. Keadaan ini menandakan daerah tersebut masih belum mampu berkembang dan meningkatkan pendapatan regionalnya. Penyebab rendahnya PDRB per Kapita di Jawa Tengah yaitu karena tingginya disparitas pendapatan yang terjadi pada periode 2019, serta ditambah oleh sebagian besar kota dan kabupaten di Jawa Tengah yang tergolong ke dalam kelompok daerah yang cukup tertinggal (Hidayah & Tallo, 2020).

Disamping pendapatan sebagai determinan utama konsumsi rumah tangga, kebijakan pemerintah yang dalam hal ini pemerintah daerah juga turut berpengaruh terhadap konsumsi rumah tangga. Peran pemerintah yang dapat dilakukan untuk menggerakkan perekonomian yaitu lewat kebijakan fiskal, baik melalui pengaturan pengeluaran pemerintah maupun regulasi perpajakan. Keynesian berpendapat bahwa perubahan pada pengeluaran pemerintah akan menghasilkan *multiplier effect* pada pengeluaran konsumsi, hal ini karena pengeluaran konsumsi merupakan komponen utama dari permintaan agregat (Sugiarto & Wibowo, 2020).

**Grafik 2. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah dan Konsumsi Rumah Tangga di Pulau Jawa Tahun 2017-2021**



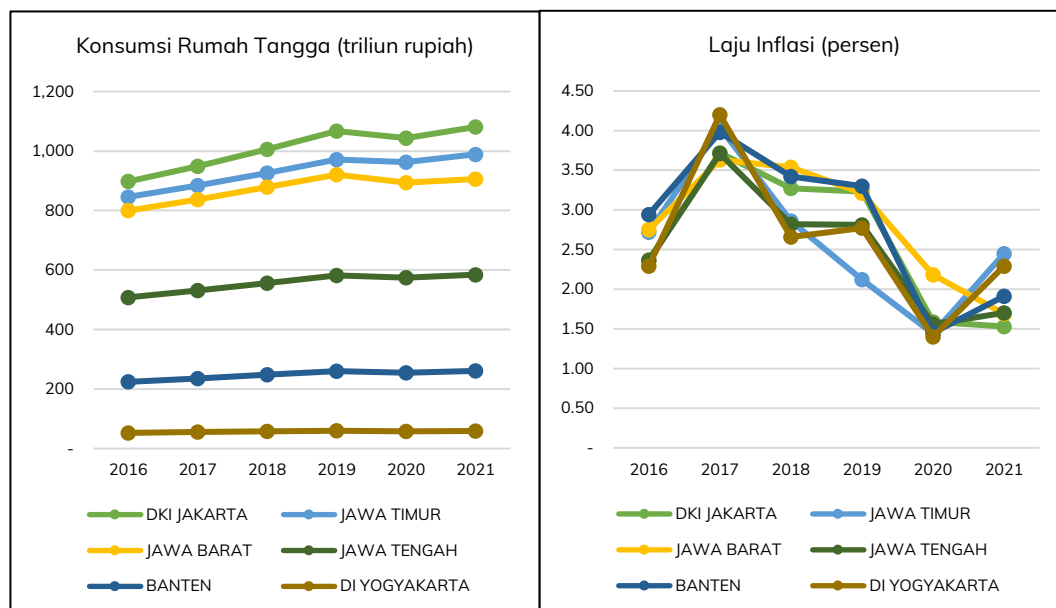
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Pada Grafik 2. tersaji jumlah realisasi belanja atau pengeluaran pemerintah daerah tingkat provinsi di Pulau Jawa. Bila dicermati, jumlah belanja pemerintah Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami kenaikan di tahun 2020, sedangkan disaat periode yang sama belanja pemerintah di provinsi lainnya mengalami penurunan. Peningkatan belanja ini juga menimbulkan *gap* dengan teori, dimana seharusnya peningkatan belanja menyebabkan peningkatan pada konsumsi rumah tangga, namun ternyata konsumsi di Jawa Barat dan Jawa tengah mengalami kontraksi masing-masing sejumlah 2,89% dan 1,42%. Hal tersebut karena adanya pemusatan kembali anggaran guna pengendalian Pandemi Covid-19 di tahun 2020. Peningkatan tersebut terjadi pada belanja tak terduga, belanja hibah, serta belanja bantuan sosial (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021). Menurut keynesian, ekspansi fiskal yaitu dalam hal ini melalui penambahan belanja pemerintah yang ditujukan untuk pembelanjaan sosial, maka akan menyebabkan pendapatan disposabel yang lebih tinggi dan dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga baik dalam jangka pendek maupun menengah (Arapova, 2018). Namun kenyatannya belanja yang telah dikeluarkan masih belum mampu meningkatkan konsumsi.

Berdasarkan data, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan realisasi belanja pemerintah yang tergolong besar, kemudian dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangganya juga tercatat menempati urutan tiga terbesar. Fenomena ini sesuai dengan teori, dimana dengan besarnya belanja daerah membuat konsumsi yang dikeluarkan rumah tangga juga relatif besar. Keadaan tersebut menandakan pemerintah daerah telah berhasil dalam memaksimalkan belanja daerah sebagai instrumen fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di daerah, khususnya dalam upaya mengatasi ketimpangan, pengentasan kemiskinan, dan membuka lapangan kerja (Kanwil DJPb DKI Jakarta, 2019). Besarnya belanja daerah DKI Jakarta disebabkan oleh penerimaan pendapatan daerah yang tinggi. Pada Provinsi Jawa Timur proporsi tiga besar belanja daerah pada urusan wajib pada 2019 masih pada kelompok pendidikan sebanyak 41,38%, kesehatan sebanyak 27,02%, serta pekerjaan umum dan penataan ruang sebanyak 20,14%.

Provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten menjadi provinsi yang memiliki realisasi belanja daerah ketiga terendah, yang diiringi dengan capaian konsumsi rumah tangga yang juga rendah. Hal tersebut menguatkan teori dimana belanja pemerintah yang rendah menyebabkan konsumsi rumah tangga juga turut rendah. Pada Provinsi Jawa Tengah, terjadi penurunan realisasi belanja mencapai 93,265 miliar rupiah atau 85.59%, dimana turun sebesar 4,78% ketimbang tahun lalu. Penurunan ini disebabkan adanya realokasi anggaran dan kebijakan pemusatan kembali kegiatan yang dipicu oleh pengendalian pandemi Covid-19 (Kanwil DJPb Jawa Tengah, 2020). Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi belanja di Banten yaitu karena beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten memiliki Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang rendah, yang artinya derajat kemandirian daerah dalam rangka mendanai kegiatan pemerintahnya sangat rendah (Kanwil BI Provinsi Banten, 2019). Pada Provinsi DI Yogyakarta, realisasi belanja APBD-P seluruh kabupaten dan kota di Yogyakarta tumbuh melambat dibandingkan waktu yang sama tahun lalu. Faktor melambatnya realiasi APBD-P tersebut yaitu karena dua komponen, yaitu komponen langsung serta belanja belanja tidak langsung (Kanwil BI Provinsi DI Yogyakarta, 2020).

**Grafik 3. Laju Inflasi dan Konsumsi Rumah Tangga di Pulau Jawa Tahun 2016-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Inflasi adalah salah satu indikator makroekonomi yang berhubungan kuat dengan daya beli masyarakat. Inflasi menjadi barometer dalam mengukur tingkat harga sejumlah komoditas pada periode tertentu. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan meningkatnya ketidakpastian pergerakan harga, sehingga berdampak pada penurunan konsumsi (Sekantsi, 2016). Menurut Keynes, tingkat inflasi secara negatif mempengaruhi konsumsi agregat (Keho, 2019). Kenaikan inflasi menjadi tanda naiknya harga komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Peningkatan harga komoditas yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan akan membuat masyarakat secara terpaksa mengurangi jumlah pengeluaran konsumsi mereka. Berdasarkan pada Grafik 3. di atas, perkembangan inflasi dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 di seluruh provinsi di Pulau Jawa terpantau fluktuatif namun cenderung menurun. Gambaran umum tren inflasi di Pulau Jawa sebagaimana berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa rata-rata tingkat inflasi tahunan tumbuh dari 2,58% di tahun 2016 menjadi sekitar 3,72% di tahun 2017. Secara berturut-turut pada tahun 2018, 2019, 2020 inflasi turun menjadi 3,10%, 2,91% dan 1,60%. Baru kemudian kembali naik pada tahun 2021.

Peningkatan inflasi pada tahun 2017 terjadi di seluruh provinsi termasuk Provinsi Banten. Berdasarkan data, inflasi di Banten naik dari 2,94% menjadi



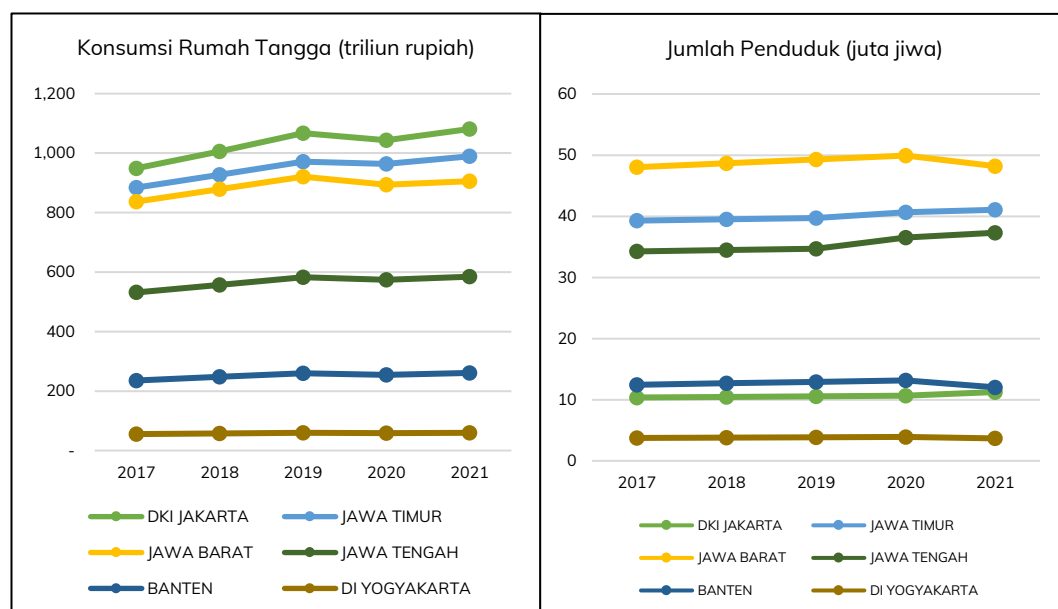
3,98%. Adapun komoditas utama penyumbang inflasi diantaranya adalah tarif listrik, rokok kretek filter, akademi/ perguruan tinggi, bensin, dan beras. Seirama dengan hal tersebut, pertumbuhan konsumsi terpantau turut melambat. Perlambatan konsumsi rumah tangga utamanya terjadi pada konsumsi jenis restoran dan hotel, serta transportasi dan komunikasi (Kanwil BI Provinsi Banten, 2018). Pada tahun 2018, inflasi DI Yogyakarta terpantau sebesar 2,66%, lebih rendah dari tahun 2017 4,20%. Rendahnya inflasi di tahun 2018 disebabkan oleh menurunnya tingkat inflasi pada kelompok transportasi serta kelompok perumahan, listrik, dan gas. Sejak kenaikan listrik tahun pada 2017, pemerintah berkomitmen tidak ada peningkatan Tarif Tenaga Listrik (TTL) hingga 2018, sehingga hal turut andil dalam penurunan inflasi (Kanwil BI Provinsi DI Yogyakarta, 2019). Disisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung tumbuh melambat. Dinamika perekonomian domestik akibat ketidakpastian perekonomian global membuat belanja masyarakat tertahan, selain itu penurunan jumlah wisatawan sebagai dampak dari banyaknya bencana alam di 2018 dan dikeluarkannya *travel advice* di beberapa negara untuk berkunjung ke Indonesia juga turut mempengaruhi konsumsi.

Pada tahun 2019, inflasi Jawa Tengah relatif stabil yaitu berada pada level 2,81%. Keadaan ini disebabkan oleh meredanya tekanan beberapa kelompok diantaranya yaitu transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan serta bahan makanan. Penurunan inflasi di golongan transportasi didorong oleh tarif angkutan udara dan tarif kereta api yang telah terkendali. Hal ini yang kemudian menjadi pendorong konsumsi Jawa Tengah yang dikuasai oleh pengeluaran dalam bentuk makanan dan minuman, serta perumahan dan peralatan rumah tangga. Ketiga komponen tersebut memiliki pangsa mencapai 77,10% dari jumlah konsumsi rumah tangga tahun 2019 (Kanwil BI Provinsi DKI Jakarta, 2020). Pada Provinsi Jawa Timur, di tahun 2019 inflasi tercatat sebesar 2,12% turun dibanding tahun sebelumnya. Melambatnya tekanan inflasi pada tahun 2019 sebagai dampak pelemahan inflasi di kelompok rumah, air, listrik, dan gas, lalu kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga justru tumbuh sedikit melambat. Perlambatan konsumsi tersebut disebabkan oleh terbatasnya pendapatan rumah tangga. Keadaan tersebut searah dengan

penurunan kinerja sektor pertanian yang merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Provinsi Jawa Timur (Kanwil BI Provinsi Jawa Timur, 2020). Pada Desember 2020, inflasi DKI Jakarta tercatat sebesar 1,59%, turun dibanding inflasi pada Desember 2019 sebesar 3,23%. Penurunan inflasi tersebut dipicu oleh terbatasnya permintaan masyarakat akibat kebijakan pembatasan sosial serta terkendalanya pasokan bahan pangan. Disisi lain, konsumsi rumah tangga juga berkontraksi sebesar -2,08%. Pembatasan mobilitas masyarakat berakibat pada turunnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, yang kemudian mendorong turunnya konsumsi (Kanwil BI Provinsi DKI Jakarta, 2021).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi berdampak positif bagi perekonomian suatu daerah, melalui peningkatan permintaan agregat suatu output yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah (Dimas & Prayoga, 2019). Menurut BPS Provinsi Jawa Timur (2022) naiknya jumlah penduduk akan mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang kemudian akan berdampak pada naiknya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

**Grafik 4. Jumlah Penduduk dan Konsumsi Rumah Tangga di Pulau Jawa Tahun 2017-2021**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Sebaran penduduk Indonesia masih dominan berpusat di Pulau Jawa. Walaupun dibanding seluruh wilayah Indonesia luas geografisnya hanya sekitar 7%, Pulau Jawa didiami sebanyak 151,59 juta penduduk atau 56,10% dari total populasi Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020). Keadaan demikian menjadi salah satu pendorong tingginya konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa. Diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga teratas, akan tetapi jumlah konsumsi rumah tangganya ternyata termasuk dalam ketiga terendah. Kondisi ini tidak selaras dengan teori, dimana seharusnya dengan semakin melimpahnya manusia akan mempertinggi konsumsi. Rendahnya konsumsi di Jawa tengah disebabkan oleh penduduk yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Di Jawa tengah, penduduk daerah perkotaan di Jawa Tengah paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Jawa, yaitu sebesar 45,70% berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 (Wahyuni & Parameswari, 2017). Fenomena berikutnya terjadi di DKI Jakarta yang mempunyai jumlah penduduk terendah kedua di Pulau Jawa, meskipun demikian capaian konsumsi rumah tangganya merupakan yang tertinggi. Keadaan tersebut menandakan *gap* dengan teori, dimana jumlah penduduk yang sedikit tidak berdampak pada konsumsi rumah tangga. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini dikarenakan status DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian serta ditambah dengan lokasi tempat tinggal penduduk yang seluruhnya berada di wilayah perkotaan. Hal ini dikarenakan faktor harga, pendapatan dan selera yang lebih tinggi membuat konsumsi daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.

Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Pulau Jawa dan di Indonesia. Tercatat penduduknya berjumlah 49,9 juta jiwa menurut sensus penduduk tahun 2020, namun banyaknya jumlah penduduk tidak serta merta menjadikan konsumsi rumah tangga di Jawa Barat tinggi. Berdasarkan data, konsumsi rumah tangga di Jawa Barat masih lebih rendah dari DKI Jakarta dan Jawa Timur. Fenomena tersebut menunjukkan *gap* dengan teori, ternyata jumlah penduduk yang melimpah tidak berdampak besar pada konsumsi rumah tangga di Jawa Barat. Hal ini terjadi karena masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Menurut BPS

Provinsi Jawa Barat (2020), TPT Jawa Barat pada Februari 2020 adalah sebesar 7,69%, dimana nilai ini jauh lebih tinggi dari TPT nasional sebesar 4,99%. Pengangguran menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak pada konsumsinya (Syahnazia et al., 2022). Provinsi DI Yogyakarta menjadi provinsi dengan penduduk yang paling sedikit di Pulau Jawa, sekaligus juga provinsi dengan capaian konsumsi rumah tangga terendah. Disamping itu, provinsi Banten juga mengalami keadaan yang tidak jauh berbeda. Rendahnya jumlah penduduk berdampak pada konsumsi yang dikeluarkan rumah tangga di daerah tersebut juga termasuk yang terendah. Fenomena pada kedua provinsi menguatkan teori yang menyatakan jumlah penduduk berperan dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dengan menganalisis pengaruh PDRB per Kapita, belanja pemerintah, inflasi serta jumlah penduduk terhadap konsumsi rumah tangga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zarkasi dan Hidayah (2021) serta Yudanto, Rochaida, dan Priyagus (2020), yang menyatakan PDRB perkapita berpengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga. Pada penelitian terkait pengaruh belanja pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga yang dilakukan Keho (2019) diperoleh hasil bahwa belanja pemerintah berpengaruh signifikan positif, akan tetapi menurut Selawati dan Purwanti (2019), pada jangka pendek ternyata belanja pemerintah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Bonsu and Muzindutsi (2017) meneliti pengaruh inflasi terhadap konsumsi rumah tangga dan diperoleh hasil bahwasanya inflasi memiliki pengaruh negatif signifikan. Arapova (2018) meneliti pengaruh jumlah penduduk terhadap konsumsi rumah tangga. Dari penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk memiliki peran dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang sudah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga Di Pulau Jawa*”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Kondisi konsumsi rumah tangga sebagai penyangga utama pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan, namun dilihat dari tingkat pertumbuhannya masih cenderung melambat, serta lebih rendah dibanding pertumbuhan konsumsi rumah tangga di pulau lain. PDRB per Kapita, belanja pemerintah, inflasi, dan jumlah penduduk berkontribusi terhadap dinamika pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dengan besarnya pendapatan perkapita Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain, ternyata belum mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Belanja yang dikeluarkan pemerintah yang sebagian besar ditujukan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah juga masih belum sepadan dengan hasil yang ditunjukkan oleh indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga. Disisi lain, harga-harga semakin terjangkau yang ditunjukkan dengan turunnya laju inflasi tahunan, juga masih belum mampu menaikkan daya beli masyarakat. Melimpahnya jumlah penduduk sebagai konsumen akhir masih belum mampu memberikan sumbangan terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Dengan penjelasan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh PDRB per Kapita terhadap konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh belanja pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB per Kapita terhadap konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa.
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa.

3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian yang dilakukan peneliti terbagi menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperbanyak pengetahuan dan wawasan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga di Pulau Jawa. Harapannya penelitian ini mampu menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan, serta juga mampu menjadi rujukan yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Membagikan andil pemikiran dan gagasan mengenai langkah dan kebijakan publik, terutama yang berhubungan dengan belanja pemerintah sehingga berdampak positif bagi perekonomian.

- b. Bagi masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi rumah tangga, serta mengenai dampak dari kebijakan pemerintah pada konsumsi rumah tangga.

- c. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan mengenai fenomena konsumsi rumah tangga yang dapat dipengaruhi oleh beragam faktor serta media bagi peneliti guna mengaplikasikan teori yang telah didapat selama mengenyam pendidikan di jenjang perkuliahan.

- d. Bagi mahasiswa

Menjadi upaya bagi mahasiswa untuk peka dan kritis terhadap masalah yang sekarang terjadi.